

PENUMPASAN PEMBERONTAKAN DI/TII DI PULAU KABAENA

¹⁾Haeruddin dan ²⁾Wa Ode Asri Yanti

¹⁾Dosen dan ²⁾Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unidayan
Baubau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Latar belakang masuknya DI/TII di Kabaena dan Dampak yang ditimbulkan akibat Gerakan DI/TII di Kabaena. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer berupa arsip/dokumen, dan sumber sekunder berupa artikel, buku, majalah, jurnal, yang diperoleh dari laporan-laporan hasil penelitian

Beberapa temuan pokok penelitian ini, adalah; Pertama adalah kondisi wilayah pulau Kabaena yang dikelilingi oleh laut, ini akan menyelamatkan pasukan DI/TII dari pasukan brimob yang akan melakukan penumpasan di setiap wilayah Sulawesi Tenggara. Di samping itu, Kabaena yang wilayahnya dominan gunung dan hutan, ini akan dijadikan sebagai tempat yang sangat strategis untuk persembunyian gerilyawan pasukan DI/TII. Selain letak geografis, faktor penunjang lainnya karena banyaknya migrasi suku Bugis di pulau Kabaena, ini akan mempermudah pasukan DI/TII dalam berinteraksi dengan masyarakat sehingga akan mempermudah untuk melakukan perekrutan pasukan. Gerakan DI/TII pertama kali masuk di Kabaena melalui di Kolaka Utara. Setelah itu mulai meluas hingga di Boepinang, kemudian masuk di Poleang ini dikarenakan adanya penumpasan yang dilakukan oleh pasukan brimob, selain itu banyaknya migrasi suku Bugis di daerah tersebut menjadikan gerakan DI/TII menyebar dengan cepat hingga Kasipute dan meluas di Kabaena. Kedua Dampak dari gerakan DI/TII di Kabaena adalah mengungsinya masyarakat akibat menghindari perekrutan pasukan DI/TII. Akibatnya pasukan DI/TII mulai melakukan penyimpangan seperti perampokan, pembakaran, penculikan. Selain itu, dampak lainnya adalah mengungsinya masyarakat secara besar-besaran dari tempat-tempat yang tidak aman yang menjadi basis gerilyawan ke daerah yang lebih aman, seperti mengungsi di hutan atau ke Baubau atau ke daerah yang dikuasai oleh brimob.

Kata Kunci: Pemberontakan, DI/TII, Pulau Kabaena

PENDAHULUAN

Situasi politik di Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, ternyata tidak semulus yang di harapkan oleh masyarakat dan pimpinan bangsa Indonesia. Periode ini merupakan satu episode penting sejarah terbentuknya wajah negara pasca revolusi melemahkan yang menghancurkan tatanan masyarakat lama (Sita Van Bemmelen & Remco Raben, 2011: 1). Gejolak politik sering bermunculan untuk mengganggu disabilitas keamanan dalam upaya merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik diartikan antara lain sebagai urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga berarti kebijakan bertindak dalam menghadapi dan menangani satu masalah, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun selainnya. Setelah pengakuan kedaulatan dicapai pada akhir 1949, masalah yang kemudian mengemuka adalah pertikaian internal dalam negeri.

Pemberontakan terhadap Jakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia meletus di beberapa tempat, salah satunya di Sulawesi. Pertentangan antara kelompok Kahar Muzakkar dengan pihak Republik menggelora di sepanjang tahun 1950-an. Penyebabnya adalah tuntutan Kahar soal ketentaraan yang tak diloloskan pihak TNI. Dalam menangani pemberontakan itu, Republik melakukan tawar-menawar dengan kelompok Kahar yang ternyata tidak begitu solid. Sampai tahun 1953, gerakan Kahar kian compang-camping akibat taktik pemerintah yang menghubungi satuan-satuan kelompok di bawah Kahar secara terpisah.

Dalam keadaan itu, Kahar mencari satu landasan kuat untuk memperkokoh kembali pasukannya sehingga 7 Agustus 1953, Kahar mendeklarasikan gerakannya sebagai bagian dari DI/TII Jawa Barat dan Aceh di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Satu langkah yang berimplikasi pada konstelasi konflik antara kelompoknya dengan Republik. Jika sebelumnya tuntutan terhadap Republik didasarkan pada ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan dalam ranah militer, akibat deklarasi 7 Agustus itu, pemberontakan mereka diterjemahkan menjadi suatu upaya untuk mendukung ideologi dan pemerintahan lain di wilayah Republik yang baru berdiri. Maka secara resmi pada tanggal 7 Agustus 1949 berdiri organisasi Negara Islam Indonesia (NII) (<https://ojs.unm.ac.id/index.php/pattingalloang/article/view/8469>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021).

Demi menopang NII yang dibentuknya, maka S. M. Kartosoewirjo membentuk sebuah gerakan yang disebut Darul Islam (DI) dan para tentaranya diberi julukan Tentara Islam Indonesia (TII) yang dibentuk pada saat provinsi Jawa Barat ditinggalkan oleh Pasukan Siliwangi yang sedang berhijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan Perundingan Renville (Gonggong, 2014).

Dalam perkembangannya, gerakan DI/TII ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di seluruh pelosok Negara Indonesia, seperti pemberontakan di beberapa daerah salah satunya pemberontakan yang dilakukan oleh Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi. Pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar ini di latarbelakangi kekecewaan Kahar terhadap kebijakan pemerintah pusat, sehingga

membuat Kahar Muzakkar memberontak kepada pemerintah kurang lebih 15 tahun (<https://ojs.unm.ac.id/index.php/pattingalloang/article/view/8469>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021).

Di Sulawesi gerakan DI/TII di pimpin oleh Kahar Muzakkar, pemberontakan ini hampir berhasil menguasai seluruh daerah pulau yang ada di Sulawesi. Gerakan-gerakan tersebut tentu memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat yang menjadi korban. Meskipun arah gerakannya bersifat lokal dan menggunakan pendekatan fanatisme keagamaan dan memobilisasi masa, namun motifasi dan faktor penyebab serta pemimpinnya di masing-masing daerah menjadi berbeda (Hamid, 2008:1).

Tujuan dari gerakan tersebut hendak mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini kemudian berkembang dan lambat laun tak sesuai lagi dengan tujuannya. Para pengikut yang telah melakukan berbagai bentuk keonaran sehingga masyarakat menganggap pasukan DI/TII sebagai gerombolan. Bergesernya tujuan dari pasukan DI/TII, dimana anggotanya/pasukannya membuat berbagai bentuk keonaran dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, agar terhindar dari berbagai bentuk pantauan dari TNI, maka daerah sasarannya diupayakan harus jauh dari jangkauan dan pantauan TNI.

Di Buton gerakan DI/TII pertama kali masuk yaitu di Wanci (Wakatobi), kemudian pergerakan tersebut membesar hingga meluas masuk ke Lasalimu dan di Kulisusu yang melewati daerah Wasuamba yang kala itu mendapat perlawanan dari pihak TNI yang bermarkas di Lawele. DI/TII pun terpaksa mundur. Selain Kulisusu, daerah kepulauan yang menjadi markas DI/TII yaitu Kabaena.

Kabaena adalah pulau yang sangat strategis, pulau ini dikelilingi oleh laut, dalam hal ini jika pasukan DI/TII berada dalam wilayah tersebut, maka akan menyulitkan pasukan brimob untuk melakukan penumpasan. Di samping itu, di wilayah Kabaena terdapat bukit dan gunung yang jika suatu ketika mereka terdesak memungkinkan untuk lari dan bertahan di pegunungan. Awal kedatangan DI/TII masih bersikap baik, tetapi kemudian lama-kelamaan mulai menimbulkan keresahan sendiri bagi masyarakat pribumi, mereka melakukan pembakaran, perampokan serta pembunuhan pada masyarakat pribumi, tentu pada kondisi ini membuat masyarakat pribumi harus berjuang, mereka berjuang hidup dengan berpindah-pindah dari tempat yang menjadi basis gerilyawan menuju daerah-daerah yang lebih aman dan berusaha bertahan demi menghindari perang dan menyelamatkan diri (Rosmina, 2014:26). Hadirnya DI/TII mengakibatkan penderitaan masyarakat Kabaena, karena sering menerima teror dari pasukan DI/TII. Selain mengancam para masyarakat, DI/TII juga merampas harta benda milik masyarakat untuk mencukupi kebutuhan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber sehingga mendapatkan fakta sejarah yang otentik dan

dapat dipercaya. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis meliputi arsip, buku-buku ilmiah dan sumber lisan.

Data primer diperoleh melalui observasi di lapangan dan wawancara dengan informan yang merupakan Eks pasukan Kahar Muzakar. Sedangkan data sekunder merupakan kesaksian dari seseorang yang tidak secara langsung menyaksikan suatu peristiwa seperti naskah buku serta jurnal yang membahas tentang pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar.

Data sekunder diperoleh dari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti termasuk hasil penelitian yang telah lebih dulu didokumentasikan dan dipublikasikan maupun referensi lainnya seperti jurnal, monografi, dan berbagai makalah yang relevan sebagai penunjang data primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Negara Islam Indonesia (NII), Tentara Islam Indonesia (TII) atau biasa disebut dengan Darul Islam (DI) adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh politisi muslim yang radikal yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Kampung Cisampah, Kecamatan Ciawilgar, Kawedaan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kartosoewirjo merupakan sekretaris dari partai MIAI yang dirubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada Oktober 1947. Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar Agama Islam sebagai dasar negara (Ruslan, 2008).

Dalam perkembangannya, Negara Islam Indonesia ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di Negara Indonesia. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan diberbagai wilayah di Nusantara seperti pemberontakan Amir Patah di Brebes, Tegal dan Kyai Somolagu (Kebumen) di Jawa Tengah (1950-1959), Pemberontakan Daud Beureueh di Aceh (1953-1962), Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan (1954-1963) dan Pemberontakan Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan (1950-1965) (Gonggong, 2014). Salah satu pemberontakan yang akan selalu dikenang dalam sejarah Sulawesi Selatan yaitu pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar. Pemberontakan yang dilatarbelakangi dengan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Kekecewaan tersebut membuat ia melakukan pemberontakan yang berlangsung kurang lebih selama 15 tahun.

Sebelum bergabung dengan DI/TII, Abdul Kahar Muzakkar selaku komandan dari Komando Grup Seberang (KGS) dengan pangkat Letnan Kolonel meminta Saleh Syahban untuk menghimpun para kelaskaran Sulawesi Selatan dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Pembentukan kesatuan tersebut bertujuan untuk menghimpun semua gerilyawan yang ada di Sulawesi Selatan dalam KGSS. KGSS dibentuk pada Agustus 1949 di Maros (Poelinggomang, 2005). KGSS yang berkekuatan 10 batalyon diharapkan menjadi cikal bakal Divisi Hasanuddin dengan Kahar Muzakkar sebagai pemimpinnya (Gonggong, 2014).

Pada tanggal 1 Juli 1950, atas nama kaum gerilyawan Kahar Muzakkar menemui Kolonel Kawilarang selaku Panglima Tentara Teritorium VII/Wirabuana (TT VII/Wirabuana) demi menyampaikan permohonan agar 15.000 gerilyawan Sulawesi Selatan diterima menjadi bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Panglima TT VII/Wirabuana sehingga dengan emosi ia menyatakan bahwa ia memutuskan hubungannya dengan TNI. Kemudian pada tanggal 5 Juli, Kahar Muzakkar lari ke dalam hutan dan membangkang terhadap pemerintahan Republik (Mattalioe, 1994).

Akibat dari perbuatan Abdul Kahar Muzakkar, Panglima mengeluarkan suatu dekrit yang menyatakan pembubaran KGSS sebagai organisasi kelaskaran gerilya. Dalam dekrit yang dikenal dengan nama "Dekrit Kawilarang", yang berbunyi: *"KGSS dari organisasi gerilya di luar APRIS" dianggap telah bubar dan segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkan organisasi tersebut termasuk larangan tentara*". Mendengar dekrit tersebut Abdul Kahar Muzakkar marah dan memberi reaksi sangat keras dengan mencabut tanda pangkatnya lalu mencampakkan dihadapan panglima TT VII/Wirabuana dengan diiringi kata-kata ini tidak ada gunanya (Harvey, 1989). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Kahar Muzakkar tidak setuju dengan sikap Kawilarang untuk membubarkan KGSS (Mattalioe, 1994).

Sejak peristiwa itu Kahar Muzakkar dengan anggota lainnya memutuskan untuk masuk ke hutan Sulawesi untuk bergerilya. Andi Sose selaku Panglima KGSS Massenrempulu menculik Abdul Kahar Muzakkar dan dibawa ke Baraka yang merupakan wilayah Enrekang. Di Baraka Kahar Muzakkar, mendapatkan perlindungan dari Andi Sose ini dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah operasinya. Dalam kenyataan sesungguhnya, dia di culik KGSS, atas prakarsa Andi Sose, walaupun mungkin sekali Andi Sose bertindak demikian berdasarkan perintah atau setidak-tidaknya dengan persetujuan Abdul Kahar Muzakkar diam-diam (Van Dijk, 1983).

Masalah gerilya di Sulawesi Selatan pun kian semakin rumit. Banyaknya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan para gerilyawan sehingga tidak

memungkinkan untuk menempuh jalan perundingan. Hal itu memaksa Panglima TT VII/Wirabuana Kolonel Kawilarang mengeluarkan perintah gerakan dengan tindakan kekerasan untuk menumpas pembangkang Crops Tjadangan Nasional (CTN) yang dianggap sebagai pengacau-pengacau negara pada 17 Agustus 1951. Setelah mendapat surat dari Kartosuwiryo melalui Bahar Mattalui pada Agustus 1951 Kahar Muzakkar baru menerima tawaran Kartosuwirjo untuk bergabung dengan NII pada tanggal 20 Januari 1952. Kemudian Kahar Muzakkar memutuskan untuk bergabung dengan DI/TII dan memproklamasikan Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1953 (Arsip Nasional RI Ujung Pandang, arsip Muhammad Saleh Lahade, 1937-1973, No. Reg. 191) yang berlokasi di Buntu Susu (Baraka) yang terletak di Kabupaten Enrekang, dan sekaligus menjadi markas DI/TII di Sulawesi Selatan. Abdul Kahar Muzakkar mempunyai sekurang-kurangnya 7.000 orang dibawah pimpinannya dalam KGSS. Brigade ini mempunyai lima Batalyon yang berlokasi di Pinrang, Luwu, Enrekang, dan Bonthain.

Gerakan DI/TII yang dikomandoi oleh Kahar Muzakkar cepat menyebar luas di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Hal ini sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Kahar Muzakkar, yaitu dengan adanya pembentukan divisi untuk beberapa kawasan di Indonesia Timur. Empat divisi yang direncanakan untuk dibentuk oleh Kahar Muzakkar, namun hanya dua divisi yang berhasil dibentuk yaitu divisi I Hasanuddin untuk wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Tenggara. sedangkan Divisi II untuk wilayah Sulawesi Selatan. Sementara divisi III untuk wilayah Nusa Tenggara dan divisi IV untuk wilayah Maluku dan Irian Barat, namun sampai berakhirnya gerakan DI/TII tahun 1965 divisi III dan IV tidak berhasil dibentuk (Dedy, 2015:30).

Wilayah divisi I terdiri dari empat resimen/Komando Daerah (KD), sedangkan wilayah komando Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Komando Letnan Kolonel Muhammad Djufri Tambora dengan kepala stafnya Mayor II Asmada yang beroperasi di Kasabo Boepinang. Djufri Tambora adalah seorang yang telah memiliki pengalaman gerilya di Kolaka dan selama masa revolusi fisik turut menemani aktifitas Kahar Muzakkar di Jawa. Kedekatan mereka bukan tanpa alasan, Djufri dan Kahar sama-sama berasal dari siswa Mualimin Muhammadiyah Solo. Djufri juga bergabung dalam Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bentukan Kahar setelah ia dibebaskan dari penjara Nusakambangan oleh Kahar, lalu ikut berlatih untuk kemudian menjadi pasukan inti Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS). Ketika gerakan Kahar mulai berafiliasi dengan gerakan DI/TII Kartosuwiryo, Djufri Tambora langsung menjadi Komandan Brigade II DI/TII (Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi 1950-1960. No reg. 323) di Sulawesi Tenggara yang membawahi empat batalyon antara lain: Batalyon I di Kendari dan Muna. Batalyon II di Boepinang, Uluraya. Batalyon

III di Kolaka, dan Batalyon IV di Buton dan Kepulauan Tukang Besi. Di Sulawesi Tenggara, gerakan DI/TII kerap diidentifikasi dengan sebutan “gerombolan” (Gazaluddin, 1994: 41). Ini bisa dilihat dari pasukan DI/TII yang suka bergerombol dan penampilan mereka yang berambut panjang, berjenggot dan bersenjata lengkap.

Sejak Kahar Muzakkar memproklamlirkan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, banyak anggota dan simpatisannya yang kala itu didominasi oleh suku Bugis mulai melakukan perekrutan pasukan di wilayah-wilayah terpencil Sulawesi Selatan hingga meluas di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara yang sejak dahulu telah ada migrasi suku Bugis menjadi kemudahan bagi Kahar untuk melakukan perekrutan sebagai tambahan pasukan dalam memperkuat posisi dan kekuatan angkatan militernya. Salah satu daerah Sulawesi Tenggara yang cukup banyak menjadi tempat imigrasi suku Bugis adalah Boepinang, Poleang, Kasipute hingga di Kabaena.

Gerakan DI/TII pertama kali masuk di Sulawesi Tenggara yaitu di Kolaka Utara tepatnya di daerah Tondonbasi. Setelah melakukan pergerakan di Tondonbasi sebagian pasukan DI/TII mulai meluas hingga di Boepinang, kemudian pergerakan tersebut masuk di Poleang ini dikarenakan adanya penumpasan yang dilakukan oleh pasukan brimob, selain itu banyaknya migrasi suku Bugis di daerah tersebut menjadikan gerakan DI/TII menyebar dengan cepat hingga Kasipute (Ibukota Rumbia). Pasukan DI/TII mengepung Kasipute dan bermarkas diatas gunung dekat Kasipute yang kini disebut Gunung Kahar. Gerakan mereka mendapat propaganda ditengah masyarakat hingga gerakan DI/TII meluas di Kabaena.

Kabaena adalah pulau yang dikelilingi oleh laut, inilah yang akan menyelamatkan pasukan DI/TII dari pasukan brimob yang akan melakukan penumpasan di setiap wilayah Sulawesi Tenggara. Di samping itu, Kabaena yang wilayahnya dominan gunung dan hutan, ini akan dijadikan sebagai tempat yang sangat strategis untuk persembunyian gerilyawan pasukan DI/TII. Selain letak geografis, faktor penunjang lainnya karena banyaknya migrasi suku Bugis di pulau Kabaena, akan mempermudah pasukan DI/TII dalam berinteraksi dan bisa menepis kecurigaan terhadap keberadaan pasukan DI/TII oleh pasukan brimob sehingga akan mempermudah untuk melakukan perekrutan pasukan.

Sebelum pasukan DI/TII masuk di Kabaena, daerah tersebut adalah perkampungan biasa yang oleh masyarakat, yang tidak menunjang untuk dijadikan sebagai markas gerilyawan DI/TII. Karena saat itu yang menjadi tempat markas persembunyian pasukan DI/TII dari proses penumpasan adalah Poleang dan Kasipute. Di Poleang, Kahar mendirikan Sekolah Rakyat, karena ia menyadari akan kekurangan yang dihadapi oleh pasukannya di bidang

Pendidikan dan Kesehatan. Ketika Sekolah Rakyat didirikan, yang menjadi fokus utama dari pembelajaran di lembaga pendidikan itu adalah ilmu Agama Islam. Namun kurangnya tenaga pengajar membuat pasukan DI/TII mencari tokoh adat dan agama di setiap wilayah terpencil yang dianggapnya cerdas untuk dijadikan sebagai tenaga pengajar (Fikriansyah, 2020:60). Sedangkan di Kasipute menjadi tepat markas persembunyian pasukan DI/TII yang melarikan diri dari pasukan brimob dari Poleang.

DI/TII masuk pertama kali di Kabaena pada tahun 1953, tepatnya di Pulau Baliara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Djufri Tambora (komandan resimen II dari Divisi II). Letak geografis pulau Baliara yang cukup dekat dari arah Kasipute ini menjadikan pulau tersebut menjadi sasaran selanjutnya. Saat memasuki wilayah Kabaena kala itu pasukan DI/TII akan melakukan perekrutan pasukan sekaligus mencari tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat yang didirikannya. Namun karena penampilan mereka dengan senjata lengkap yang cukup menyeramkan membuat masyarakat ketakutan dan menolak mengikuti gerakan DI/TII. Karena mendapat penolakan pasukan DI/TII langsung melakukan pemberontakan dan merampok beberapa uang masyarakat lalu kembali ke Kasipute. Akibat gejolak awal yang dilakukan oleh pasukan DI/TII membuat masyarakat di pulau Baliara mengungsi di Sikeli.

Pada tahun 1954, Pasukan DI/TII yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Djufri Tambora kembali ke pulau Baliara, namun karena tidak adanya masyarakat, mereka kearah barat pulau Kabaena, yakni Sikeli dan Batuawu. Letak geografis Sikeli yang cukup dekat dengan pulau Baliara ini membuat pasukan DI/TII menjadikan Sikeli menjadi sasaran selanjutnya. Sedangkan di Batuawu sendiri yang jaraknya tidak berada jauh dari Sikeli sehingga membuat pasukan DI/TII gampang ke Batuawu. Di Batuawu, bersenjata Karabijn dan pistol, DI/TII itu memaksa masyarakat untuk menyerahkan uang dan mengumpulkan beras. Kabaena merupakan suatu wilayah terkenal sebagai lumbung beras utama. Sejak masa gemilang Kesultanan Buton yang mana masyarakatnya memeluk Islam dari beberapa abad sebelumnya, dan dipaksa kembali berislam oleh pemberontak. Banyak tokoh masyarakat yang dipanggil untuk mengikuti gerakan DI/TII untuk dijadikan pasukan dan pelopor gerakan mereka di daerah. Namun beberapa masyarakat, tokoh adat, hingga tokoh agama menolak ajakan tersebut. Ini dikarenakan pasukan DI/TII bersenjata lengkap dan tidak segan melakukan pemberontakan hingga pembunuhan.

Tahun 1954 untuk kedua kalinya, Sikeli dan Batuawu lagi-lagi dimasuki pasukan DI/TII dari arah Rumbia dengan anggota sebanyak tiga puluh enam orang. Sesampai di Sikeli masyarakat yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengungsi dari pulau Baliara, membuat pasukan DI/TII kembali mendapat penolakan dari masyarakat. Karena mendapat

penolakan pasukan DI/TII kembali melakukan pemberontakan, mereka menggeledah perahu dan mengambil dagangan berupa kain seharga Rp1.000 yang didatangkan dari Baubau. Meski masyarakat telah memohon dan coba mempertahankan hartanya, pasukan DI/TII tidak peduli dan sebelum kembali ke arah Poleang sempat membakar empat rumah penduduk.

Di Kabaena menjadi tempat pelaut yang khususnya pedagang dan pelayar menuju Makassar atau ke Baubau yang akan melintasi dan kadang pula singgah di Kabaena, ini juga yang menjadi salah satu faktor sehingga DI/TII kembali ke Kabaena, pasukan DI/TII akan membajak kapal pedagang. Pasukan DI/TII menyandera dua belas perempuan yang berstatus gadis dan dibawa di Poleang, ini dilakukan selain menjadikannya istri, ayah dari perempuan yang disandera akan menyusul dan disitulah mereka akan dipaksa menjadi pasukan DI/TII. Tindakan pasukan DI/TII sangat merugikan masyarakat Kabaena. Kekacauan-kekacauan sering mereka lakukan seperti perampokan, pembunuhan, pembakaran, dan penculikan bagi perempuan. Kekacauan tersebut membuat masyarakat mengungsi di hutan untuk menyelamatkan diri dari pasukan DI/TII.

Di hutan, mereka tidur beratapkan langit dan beralaskan tanah, mereka tidak membuat rumah kebun untuk tempat yang nyaman, bahkan di hutan pun mereka tak menyalahkan api ini dikarenakan asap akan membuat DI/TII gampang mengetahui lokasi mereka. Di hutan penduduk kerap mengalami kelaparan karena kurangnya akses makanan, hingga tak jarang ada yang meninggal ketika dalam pengungsian (Wawancara Pak Ilfan, Februari 2021). Ketika kondisi kampung mulai kembali kondusif sebagian kepala keluarga akan kembali untuk melihat keadaan kampung. Jika kampung sudah aman, maka masyarakat akan kembali ke kampung.

Di kampung tokoh adat akan mengumpulkan perempuan yang berstatus istri dan anak pada satu rumah dan dijaga oleh beberapa laki-laki yang sudah di percayakan oleh tokoh adat. Kondisi ini untuk mengantisipasi ketika pasukan DI/TII kembali ke Kampung Batuawu, maka kepala keluarga tidak akan begitu kesulitan untuk mengevakuasi istri dan anak mereka.

Pasukan DI/TII yang tiba-tiba saja kembali ke kampung inilah yang menjadikan tokoh adat harus dengan cepat mengevakuasi masyarakat. Pada tahap kedua, Kampung Batuawu mengalami kekosongan penduduk, seluruh masyarakat sudah mengungsi di hutan. Pasukan DI/TII yang mengetahui tentang jalur hutan, membuat sebagian pasukan DI/TII menyusuri hutan untuk mencari pasukan dan mencari tempat persembunyian dan sebagiannya lagi merampok rumah warga yang telah ditinggalkan pemiliknya. Setelah merampok rumah warga pasukan DI/TII membakar seluruh Kampung Batuawu, namun ada dua rumah yang tidak terbakar api saat itu, tepatnya rumah Haji Abdul Latif selaku Tokoh Agama Kabaena dan Mokole Dai Dama. Kedua rumah tersebut menjadi

saksi sejarah betapa kejamnya gerakan DI/TII di Kabaena. Ketika selesai membakar kampung pasukan DI/TII mulai melakukan penyisiran di kampung lainnya untuk bertahan hidup di pulau Kabaena.

Setelah meninggalkan Kampung Batuawu, sebagian pasukan DI/TII membawa imam distrik bernama Haji Daud untuk dijadikan sebagai tenaga pengajar di Poleang. Disana, pasukan DI/TII menggabungkan diri dengan kelompok Djufri Tambora yang berkekuatan dua ratus orang bersenjata lengkap. Oleh Djufri, Haji Daud diminta berkeliling kampung di seluruh distrik Rumbia dan Poleang untuk memberi penerangan soal syahadat dan rukun Islam pada rakyat lain (<https://ojs.unm.ac.id/index.php/pattingalloang/article/view/8469>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021). Sedangkan sebagian pasukan DI/TII melakukan perjalanan ke arah utara pulau Kabaena hingga tiba di Kampung Tedubara sebagai sasaran gerakan selanjutnya. Sedangkan sebagiannya lagi melakukan perjalanan ke arah timur pulau Kabaena hingga tiba di Kampung Tangkeno.

Hampir sebulan lamanya Haji Daud berkeliling dengan menjalankan perintah dari Djufri sebelum akhirnya kembali ke Bambaena. Ia tidak lagi mendapati tanda-tanda masih adanya pasukan DI/TII sesampainya di Bambaena, maka seketika itu juga Haji Daud segera melarikan diri kembali ke Kabaena. Haji Daud tidak berada lama di Kabaena, ia segera menuju Baubau karena di Kabaena ia dikenali oleh seorang anggota DI/TII bernama La Untu.

Kabaena menjadi wilayah dari pasukan DI/TII ini dapat terlihat jelas dari betapa seringnya wilayah ini didatangi DI/TII sampai awal tahun 1955. Seturut dengan itu, keresahan warga juga kian mencapai titik puncaknya. Memasuki Agustus, nama Haji Patombong mulai dikenal sebagai salah satu pimpinan DI/TII di Kabaena Barat. Dalam gerakannya, Haji Patombong selalu mengincar dan menghabisi pimpinan-pimpinan kampung yang pro terhadap Pemerintah Republik. Olehnya, penduduk Batuawu membentuk suatu gerakan bernama Gerilya Penjaga Keselamatan Diri Sendiri. Gerakan tersebut dibentuk untuk mengevakuasi masyarakat dari pasukan DI/TII dan orang-orang yang pro terhadap DI/TII. Orang-orang Batuawu merasa terjebak oleh situasi sebab jika berpihak pada DI/TII mereka akan dihabisi oleh pasukan republik, begitu pula sebaliknya jika mereka berpihak pada republik maka pasukan DI/TII yang akan menangkapi mereka. Lebih jauh, Kepala Kampung Batuawu mengatakan bahwa dalam situasi itu rakyat telah kehilangan kepercayaan diantara mereka sendiri dan berada pada posisi siap saling membunuh satu sama lain.

Tahun 1955 menjadi puncak gerakan DI/TII di Kabaena, sistem pemerintahan mulai runtuh saat itu. Pasukan DI/TII terus melakukan perekrutan pasukan dari masyarakat membuat ketakutan bagi masyarakat. Setiap kali pasukan DI/TII datang, seluruh masyarakat pun mengungsi ke hutan atau melarikan diri ke

Baubau, mencari tempat yang aman dari pasukan DI/TII. Karena banyaknya masyarakat yang menepi di hutan menjadikan sistem pertanian di Kabaena runtuh, ini menjadikan kondisi pasukan DI/TII membakar pemukiman penduduk. Setelah membakar pemukiman pasukan DI/TII kembali ke Kasipute. Namun karena kondisi Kasipute yang mulai kekurangan pemasokan makanan dan sudah diketahui oleh pasukan brimob yang melakukan penumpasan di arah Kolaka, membuat sebagian pasukan DI/TII kembali menyingkir di Kabaena.

Wibawa Pemerintah Republik di wilayah Kabaena makin lemah. Hal ini di tandai dengan makin aktifnya DI/TII memungut pajak dari warga dan menghukum siapa yang tidak bersepakat dengan ideologi DI/TII. Di Kampung Tedubara, lahir suatu kampung militer TII dengan struktur pemerintahan sendiri dan hukum TII sebagai hukum yang sah. Siaran-siaran kilat dari gerakan DI/TII soal pentingnya “menghapuskan” orang-orang yang enggan bertobat pada Tuhan marak tersebar. DI/TII juga menciptakan suatu hukum berkaitan dengan kawin-cerai (<https://ojs.unm.ac.id/index.php/pattingalloang/article/view/8469>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021).

Seturut dengan itu, gerakan DI/TII makin ke arah Timur. Imam Distrik Kabaena Timur bernama Nuhung menjadi salah satu orang yang dicari oleh kelompok di bawah pimpinan Djufri. 29 Oktober 1955, DI/TII berjumlah tiga puluh tiga orang yang langsung dibawah Djufri muncul di Kampung Tangkeno Distrik Kabaena Timur. Mereka mencari Nuhung, Abdul Muis, dan Abdul Gani selaku Kampung Enano sebab orang-orang inilah yang kerap kali membocorkan informasi tentang gerakan DI/TII pada pemerintah Republik

Djufri mengingatkan agar orang-orang ini untuk memihak pada mereka atau sekalian tidak muncul jika menolak sebab akan langsung dibunuh. Saat itu pula, Djufri meminta sokongan sebanyak Rp 2.000 pada warga. Setelahnya, DI/TII meninggalkan Tangkeno (<https://ojs.unm.ac.id/index.php/pattingalloang/article/view/8469>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021).

Nuhung yang waktu itu telah mengungsikan dirinya ke bawah kaki Gunung Sabampolulu, tujuh kilometer dari Kampung Tangkeno, mengirimkan sebuah laporan pada Kepala KUAK Sulawesi Tenggara yang merinci kegiatan DI/TII di Kabaena. Yang isinya berbunyi: *“Pada tiap-tiap kampung DI/TII meminta uang sokongan sebesar Rp 3.000 sampai Rp 4.000 atau serendah-rendahnya Rp 500 serta mengambil barang-barang berupa kain juga hewan ternak seperti sapi dan kuda untuk dibawa ke Poleang.”* (<https://ojs.unm.ac.id/index.php/pattingalloang/article/view/8469>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021). Dalam suratnya yang lain, Nuhung mengaku bahwa pada 6 November 1954, pasukan DI/TII telah mengepung pasar Toli-Toli dan mendapati Kepala Kampung Enano, Abdul Gani, yang selama ini telah menjadi incaran mereka. Abdul Gani ditanyai sebab ia membocorkan gerakan DI/TII pada

pemerintah Republik. Mulanya, Abdul Gani coba mendelik dan mengaku tidak pernah berhubungan dengan Pemerintah Republik untuk melaporkan aktifitas pasukan DI/TII. Kendati demikian, kepala Kampung Enano akhirnya harus mengaku juga setelah padanya diperlihatkan salinan laporan yang ia tanda tangani. Gerombolan menembak Abdul Gani saat itu juga.

Gangguan keamanan terus dilancarkan oleh pasukan DI/TII, gerak DI/TII makin ke arah Timur pulau Kabaena hingga tiba di Tangkeno. Informasi DI/TII yang sudah terdengar lebih dulu membuat sebagian masyarakat kampung mulai melarikan diri ke hutan sedangkan sebagiannya lagi lari ke luar pulau Kabaena sampai di Baubau. Tangkeno yang sangat strategis ini membuat masyarakat sangat gampang untuk mencari tempat persembunyian. Pasukan DI/TII yang tiba di kampung dan hanya menemukan perkampungan yang sudah kosong, mulai merampok barang-barang warga dan setelah melakukan perampokan mereka mulai membakar perkampungan Tangkeno dan kembali melakukan perjalanan.

Masyarakat Tangkeno yang tidak mendukung gerakan DI/TII, membuat mereka menjadi sasaran penembakan masal di pasar rakyat Toli-Toli. Bukan hanya itu, beberapa pemuda dan beberapa perempuan dari Tangkeno dibawa oleh pasukan DI/TII untuk dijadikan sebagai pasukan dan sebagiannya lagi dijadikan budak. Namun sampai saat ini, kabar dari pemuda dan perempuan yang disandera tidak terdengar lagi.

Tahun 1956 tepat malam Selasa jam 11 malam DI/TII yang bergerilyawan mengepung pasar rakyat yang berada di arah timur pulau Kabaena di bawah pimpinan Kapten Dabing. Ini menjadi salah bentuk amarah dari pasukan karena masyarakat yang tidak ingin bergabung di menjadi pasukan DI/TII Mereka mencari Abdul Gani yang selama ini menjadi incaran selanjutnya. Kecurigaan terhadap Abdul Gani saat itu sebagai orang yang melaporkan aktifitas DI/TII pada pemerintahan Republik. Beberapa masyarakat yang akan menjual di pasar mulai dipisahkan menurut asal mereka, dan yang berasal dari Toli-Toli diikat secara bersamaan lalu ditembak. Beberapa tokoh agama yang mereka anggap sebagai orang yang cukup cerdas dibawa ke Poleang. Dalam mengepungan itu, korban yang meninggal kurang lebih sekitar 70 sampai 80 orang.

Peristiwa pembantaian di pasar rakyat Toli-Toli menjadi peristiwa yang berdarah dan mmenambah keburukan pasukan DI/TII bagi seluruh masyarakat Kabaena, ini dikarenakan proses pembunuhan yang sangat keji yang di nilai oleh sebagian masyarakat bahwa manusia yang lebih berharga dari binatang. Setelah penembakan di pasar rakyat Toli-Toli, pasukan DI/TII yang dipimpin oleh Muhammad Amin (Komandan DI/TII di Kabaena) terus melakukan perjalanan ke arah Tengah pulau Kabaena hingga tiba di Kampung Lengora. Meskipun Lengora adalah kampung dari sang komandan, namun gerakan pasukan DI/TII di Kampung Lengora tidak mendapatkan respon yang baik. Mereka tetap melakukan

pemberontakan. Gangguan keamanan terus digencarkan, pasukan DI/TII yang sudah krisis akan bahan makanan terus melakukan pemerasan dengan dalil sumbangan sekaligus merekrut tokoh adat agar dibawa di Poleang, namun karena tokoh agama menolak hingga membuat pasukan DI/TII marah.

Kemarahan pasukan DI/TII menjadi ancaman bagi masyarakat di Kampung Lengora. Pasukan DI/TII mulai melakukan penyimpangan seperti menculik dan menyandera perempuan-perempuan kampung, termasuk istri dari Pak Dawasa yang merupakan tokoh agama di Kabaena. Pasukan DI/TII membawa dengan paksa istri pak Dawasa meskipun dalam keadaan hamil tujuh bulan saat itu. Mereka melakukan itu agar Pak Dawasa mau menyusul istrinya dan mereka akan memaksa Pak Dawasa mengikuti jejak mereka. Namun Pak Dawasa tak menyusul istrinya karena takut akan ditangkap oleh pasukan DI/TII.

Pasukan DI/TII tidak ragu-ragu dalam melepaskan tembakan, jika masyarakat pribumi melawan. Beberapa masyarakat yang berstatus istri dan anak diungsikan di hutan pada dini hari. Setelah melakukan penyimpangan di Kampung Lengora, mulai terdengar berita bahwa brimob sudah tiba di Pulau Kabaena dan singgah di Kampung Dongkala, dengan tergesa-gesa mereka segera meninggalkan Kampung Lengora menuju ke arah pantai, mereka tidak lupa membakar beberapa rumah warga.

Juli 1956, tepat subuh hari, beberapa pasukan DI/TII tiba di pinggir pantai Pissing, karena menghindari pasukan brimob mereka terpaksa mendarat di Pissing sebagai basis gerakan selanjutnya, ini dikarenakan pasukan brimob yang sudah mulai mendirikan pos jaga di setiap kampung yang pernah di kunjungi oleh pasukan DI/TII. Hingga sore hari mereka memilih menetap di hutan menunggu malam tiba. Ketika petang tiba, mereka menunggu di hutan yang tidak jauh dari perkampungan. Namun keberadaan mereka tidak sengaja di ketahui oleh anak-anak yang sedang bermain bola saat itu.

Karena tempat persembunyian mereka sudah diketahui oleh anak-anak, pasukan DI/TII mulai mengepung perkampungan, ini mereka lakukan adanya kekhawatiran warga yang akan keluar dari dari perkampungan dan melapor pada brimob yang sedang melakukan jaga di Kampung Lengora. Seluruh warga di perintahkan untuk masuk di dalam rumah masing-masing. Agar tak membuat pasukan brimob curiga. Namun itu tak berlangsung lama, keberadaan mereka mulai di ketahui oleh pasukan brimob, dengan emosi mereka melepaskan tembakan hingga menewaskan seorang wanita lansia yang biasa di panggil Nenek Sahrin Gaus, Waadi, dan 2 pemuda lainnya. Sedangkan 13 pemuda dari Kampung Lengora dibawa mereka karena pasukan DI/TII mulai kekurangan pasukan. Pasukan DI/TII meninggalkan Pissing menuju kembali ke Poleang.

Pada akhir tahun 1956, Kabaena secara keseluruhan di bumi hanguskan, yang terjadi sebagian masyarakat menyingkir ke Baubau dan sebagian lagi melarikan diri ke hutan. Proses pengungsian besar-besaran inilah yang membuat kondisi ekonomi mulai lumpuh secara total. Mereka yang berlari keluar pulau Kabaena selamat dari incaran DI/TII, namun mereka yang melarikan diri ke hutan masih was-was karena DI/TII akan menemukan mereka sekali waktu. Selama bertahun-tahun hidup dalam hutan belantara, mereka harus mampu bertahan hidup tanpa mengosumsi makanan mentah, karena jika menyalahkan api, maka akan mengundang pasukan DI/TII di tempat perlindungan mereka. Ketika mulai merasa aman, mereka akan kembali ke perkampungan.

PENUTUP

Masuknya DI/TII di Kabaena didukung kondisi wilayah pulau Kabaena yang dikelilingi oleh laut, inilah yang akan menyelamatkan pasukan DI/TII dari pasukan brimob yang akan melakukan penumpasan di setiap wilayah Sulawesi Tenggara. Di samping itu, Kabaena yang wilayahnya dominan gunung dan hutan, ini akan dijadikan sebagai tempat yang sangat strategis untuk persembunyian gerilyawan pasukan DI/TII. Selain letak geografis, faktor penunjang lainnya karena banyaknya migrasi suku Bugis di pulau Kabaena, ini akan mempermudah pasukan DI/TII dalam berinteraksi dan bisa menepis kecurigaan terhadap keberadaan pasukan DI/TII oleh pasukan brimob, sehingga akan mempermudah untuk melakukan perekrutan pasukan. Gerakan DI/TII pertama kali masuk di Kabaena melalui di Kolaka Utara tepatnya di daerah Tondonbasi. Setelah itu mulai meluas hingga di Boepinang, kemudian pergerakan tersebut masuk di Poleang ini dikarenakan adanya penumpasan yang dilakukan oleh pasukan brimob, selain itu banyaknya migrasi suku Bugis di daerah tersebut menjadikan gerakan DI/TII menyebar dengan cepat hingga Rumbia dan meluas di Kabaena.

DAFTAR PUSTAKA

- Gonggong, Anhar. (1992). *Abdul Kahar Muzakkar, dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hamid, Abd. Rahman. (2008). *Kahar Mdzakar Di Persimpangan Jalan*. Pustaka Pelajar.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Madjid & Wahyudi. (2014). *Ilmu Sejarah : Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Rosdakarya.

- Nugroho, Notosusanto. (1978). *Masalah Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Indayu.
- Pranoto, Suhartono. W. (2014). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sillars Harvey, Barbara.(1989). *Pemberontakan Kahar Muzakkar: dari Tradisi ke DI/TII (Terj)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Singh, Rajendra. (2001). *Social Movements, Old and New: a Post-Modernist Critique*. NewDelhi/Thousand Oaks/London: Sage publications.
- Tarrow, Sidney. (1998). *Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Bemmelen, Sita, Raben, Remco. (2011). *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an. Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV-Jakarta.
- Wilson, John. (1973). *Introduction to Social Movements*. New York: Basic Books.

